

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Konflik

Pada umumnya konflik merupakan suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Bila kita menengok sejarah negeri ini, seringkali diwarnai berbagai konflik, baik konflik yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan para penjajah, maupun konflik yang terjadi diantara sesama bangsa ini. Dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, konflik merupakan pertentangan atau perselisihan dimana cara mencapai tujuannya yaitu dengan melemahkan pihak lawan, tanpa menghiraukan norma dan nilai yang berlaku (G.Kartasapoetra, 2007 : 71)

Sedangkan menurut James W.Vander Zanden, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan ataupun menyisihkan lawan mereka (Taufiq Rohman Dhoiri, 2006 : 36).

Setiap individu dan kelompok sering kali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan politik, ekonomi, social, dan budaya. Adanya

perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan konflik. Menurut Teori Hubungan Masyarakat yang mengungkapkan bahwa konflik terjadi karena polarisasi yang terjadi terus menerus, ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat (yang pluralis dan heterogen umumnya, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat homogen juga membuka 'chance' konflik). (Reny Candradewi, 2006 : 1)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan yang terjadi dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda dan penyelesaian yang berbeda antara kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, konflik yang terjadi antara IMF dengan pemerintah Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid terlihat ketika kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak menemui kendala dalam pengimplementasiannya, hal itu terlihat dari masalah penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). IMF menghendaki agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, tetapi Presiden Abdurrahman Wahid menghadapi demonstrasi rakyat dan hadangan dari DPR untuk menaikkan harga BBM.

2.1.2. Konsep Hubungan (Diplomasi) dan International Moneter Foundation (IMF)

Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan International Moneter Foundation (IMF) sudah dimulai ketika Indonesia diperintah oleh Presiden

Soekarno, tetapi hubungan ini terputus ketika Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam kamus Bahasa Indonesia, hubungan dapat diartikan sebagai :

” 1.kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu: kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan” (Kamus Bahasa Indonesia, 2005)

Sedangkan IMF adalah singkatan dari International Monetary Found adalah sebuah lembaga keuangan yang dibentuk sebagai mitra ekonomi internasional, yang berperan untuk dapat dapat meningkatkan kerja sama moneter internasional antara negara anggotanya yang kini berjumlah 181 negara. lembaga ini sendiri sekarang berpusat di Wasington DC, Amerika (komahiuny.wordpress.com).

Pendapat lain mengatakan bahwa IMF adalah :

“IMF adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional—yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia. IMF bertujuan untuk mencegah krisis dalam sistem tersebut dengan mendorong negara-negara supaya melaksanakan kebijakan ekonomi yang baik”. (Alicia Etchebarne, 2001 : 2)

Hubungan yang sempat terputus pada masa Presiden Soekarno akhirnya dapat dibuka lagi dengan masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB pada pemerintah Indonesia di jabat oleh Presiden Soeharto dengan Orde Barunya, karena IMF sendiri merupakan lembaga keuangan dibawah naungan PBB.

Keberlangsungan hubungan IMF dengan pemerintah Indonesia terus berlangsung sampai sekarang walaupun Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian presiden. Namun, hubungan yang terjadi juga mengalami beberapa kali pasang surut, dimana tidak semua presiden Indonesia mau atau menerima begitu saja bantuan dari IMF, misalnya pada masa Presiden B.J. Habibie hubungan ini mengalami stagnasi. Hal ini dapat dimaklumi, karena apa yang diberikan IMF kepada pemerintah Indonesia harus disesuaikan dengan keinginan IMF itu sendiri, secara tidak langsung IMF dapat mendikte kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia

Hubungan kembali mesra antara IMF dan pemerintah Indonesia terjalin kembali ketika Abdurahman Wahid menjadi Presiden Indonesia. Namun, tetap saja hubungan yang terjadi selalu menyusahkan pemerintah Indonesia, dimana dalam Letter of Intent yang ditandatangani sangat memberatkan pemerintah Indonesia yang kala itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan dari Orde Baru ke masa Reformasi. Toh IMF tetap memperlakukan Gus Dur seperti para pendahulunya, Soeharto dan Habibie, dengan Letter of Intent yang detail dan memberatkan (Ishak Rafick, 2007 : 409)

Janji IMF untuk untuk mengucurkan bantuannya kepada pemerintah Indonesia pada masa Presiden Abdurahman Wahid sebesar 43 Milyar US\$ tidak pernah ditepati sampai lengsernya Abdurahman Wahid dari kursi kepresidenan Indonesia karena terkena masalah Brunaigate.

2.1.3. Konsep Pemerintah Republik Indonesia

Definisi pemerintah secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial ekonomi, dan politik suatu Negara (W.J.S. Poerwadarminta, 1982 : 130). Sedangkan pendapat lain mengatakan pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu (Wikipedia Enslkopedia).

Berdasarkan pengertian di atas, maka pemerintah dapat diartikan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan suatu negara. Merujuk pada beberapa definisi pemerintah, maka harus mendefinisikan pula arti kata pemerintahan.

“Pemerintahan adalah urusan yang dilakukan pemerintah dalam suatu negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan menjalankan kepentingan umum yang bersifat kenegaraan” (W.J.S. Poerwadarminta, 1982 : 130).

Indonesia adalah suatu bangsa dan negara yang secara politis, resmi merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Inu Kencana Syafie dalam Sistem Politik Indonesia, sebelum merdeka Indonesia yang kerap disebut Nusantara adalah kumpulan bangsa-bangsa mandiri dan berdaulat, yang tidak jarang antar kerajaan yang satu dengan yang lainnya saling menyerang demi perluasan pengaruh.

Kata republik berasal dari kata *res* artinya kepentingan dan *publica* artinya umum, jadi mengurus kepentingan umum. Dalam pemerintahan republik, organisasi negara ditujukan untuk kepentingan bersama, rakyatlah yang menentukan pemerintahan, termasuk menentukan kepala negara yang dinamakan presiden. Berdasarkan UUD 1945, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.

Kekuasaan presiden tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh suatu undang-undang dasar, dan dalam menjalankan pemerintahan presiden dibantu oleh para menteri yang dapat diangkat dan diberhentikan sendiri oleh presiden. Kedudukan Presiden RI dalam UUD 1945 mempunyai tiga tugas pokok yaitu sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala Negara dan sebagai Panglima ABRI (A. Hafizar Hanafi, 1995 : 115). Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, berarti MPR sama dengan rakyat.

Pengaturan partisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa, keinginan-keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokratis. Di Indonesia, lembaga-lembaga itu antara lain lembaga eksekutif adalah presiden, lembaga legeslatif adalah MPR dan DPR dan lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Agung (Miriam Budihardjo, 1978 : 157)

2.2 Kerangka Pikir

Sidang Umum MPR bulan Oktober 1999 telah berhasil menetapkan dan melantik KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid dengan dibantu oleh Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua MPR), Ir. Akbar Tandjung (Ketua DPR), dan Jenderal Wiranto (Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan), menyusun Kabinet Persatuan Nasional yang diharapkan dapat segera memulihkan stabilitas politik dan perekonomian Indonesia.

Namun dalam perjalanannya, Kabinet Persatuan Nasional satu per-satu Menterinya lengser/dilengserkan oleh Presiden. Diantaranya Dr. Hamzah Haz yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, terpaksa melengserkan diri. Kemudian disusul oleh Jenderal Wiranto, Ir. Laksamana Sukardi (Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN) dan Drs. Yusuf Kalla (Menteri Perindustrian dan Perdagangan).

Untuk memantapkan pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid menyusun Kabinet baru Pasca Sidang Tahunan MPR 2000. Sejak terbentuknya susunan Kabinet tersebut sudah dua orang Menteri berhenti/diberhentikan, yaitu Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA (Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara) dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).

Namun penggantian Menteri-menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengatasi instabilitas politik, instabilitas keamanan dan krisis ekonomi belum berhasil.

“IMF tetap memperlakukan Gus Dur seperti para pendahulunya, Soeharto dan Habibie, dengan Letter of Intent yang detail dan memberatkan” (Ishak Rafick, 2007 : 409)

Kondisi dalam negeri, terbukti dengan belum terselesaikannya kerusuhan etnis/agama yang terjadi di Ambon/Maluku Utara. Juga belum terselesaikannya masalah gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kerusuhan etnis yang tercatat lainnya selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga terjadi di Poso (Sulawesi Tengah) dan yang sekarang baru terjadi di Sampit (Kalimantan Tengah). Kerusuhan etnis ini telah menimbulkan ribuan korban jiwa meninggal dunia dan harta benda yang tidak terhingga.

Akibat tidak adanya stabilitas politik dan keamanan di Indonesia maka usaha untuk mengatasi krisis perekonomian sampai sekarang belum berhasil. Disadari sepenuhnya bahwa untuk menciptakan stabilitas politik/keamanan dan stabilitas ekonomi tidak mudah terlaksana apabila pemerintah tidak cepat dan sungguh-sungguh mengambil tindakan-tindakan yang mendukung pulihnya kepercayaan rakyat Indonesia maupun dunia Internasional kepada Pemerintah, khususnya dalam usaha Pemerintah untuk mengambil tindakan pembersihan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pada situasi keadaan negara yang multi krisis seperti inilah, maka DPR-RI mengeluarkan memorandum I dan memorandum II. Dikeluarkannya Memorandum II juga tidak lepas dari perilaku Presiden yang sering memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan inkonsistensi. Presiden Abdurrahman Wahid juga dinilai kurang mempunyai sense of crisis seperti sering bepergian ke luar negeri sedangkan situasi di dalam negeri tidak kondusif seperti adanya konflik etnis di Sampit baru-baru ini. Presiden Gus Dur juga dinilai mempunyai kebiasaan menyederhanakan persoalan yang penting dan ribut dengan hal-hal sepele. Akibat perilaku Gus Dur yang terkesan otoriter berpengaruh terhadap ketidakstabilan politik/keamanan di dalam negeri yang selanjutnya menambah keterpurukan perekonomian Indonesia.

Memorandum I dan memorandum II disepakati DPR dengan semangat yang sama, yaitu hilangnya kepercayaan yang sangat signifikan terhadap Gus Dur. Presiden Wahid dalam tempo tiga bulan terakhir tidak berhasil meraup simpati dan dukungan dari fraksi lain kecuali dari F-KB, basis politiknya. Fraksi TNI/Polri yang kemarin abstain, tidak bisa dinilai mendukung atau menentang. Seluruh proses dan dinamika politik selama pemerintahan Presiden Wahid hanya bergerak dalam spectrum yang amat sempit. Yaitu mempertahankan atau kehilangan kekuasaan.

“Parlemen muncul sebagai lembaga yang galak, sedangkan eksekutif terpojok pada posisi defensif. Karena itu, Pemerintahan Gus Dur kehilangan motivasi untuk mengatasi krisis, yang justru menjadi kebutuhan utama rakyat. Gus Dur lalu dengan sadar sesadar-sadarnya mengerahkan seluruh energi untuk menjaga kekuasaan, paling tidak sampai tahun 2004”. (Tajuk Media Indonesia, 1 Mei 2001).

Contoh konflik lain yang diciptakan oleh Presiden Abdurrahman Wahid antara lain sebagai berikut :

- “1. Menurut Presiden Wahid apabila presiden dijatuhkan melalui memorandum I dan memorandum II selanjutnya Sidang Istimewa MPR RI, maka keadaan akan menjadi darurat. Oleh karena itu sebaiknya perlu dikeluarkan Dekrit, yang menurut ketua MPR Amin Rais hal tersebut menyalahi konstitusi karena Presiden dipilih oleh MPR.
2. Menurut Presiden Wahid, Megawati tidak menciptakan suasana Dwi Tunggal apabila membiarkan partainya menggelar Sidang Istimewa MPR”. (Inu Kencana Syafie, 2005 : 53-54)

Ketidakmampuan pemerintahan Abdurrahman Wahid mengatasi berbagai masalah dalam negeri dan munculnya konflik-konflik dalam pemerintahan baik itu antara legeslatif dan eksekutif serta tim ekonomi pemerintah berdampak pada hilangnya kepercayaan publik serta turut memberikan andil kepada ketidakpercayaan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF menunda mencairkan bantuannya kepada pemerintah Indonesia.

2.3. Paradigma

